Demokrasi Indonesia

Demokrasi dewasa ini dianggap sebagai sistem politik yang paling ideal untuk mencapai tujuan bernegara. Setelah Perang Dunia II, demokrasi semakin populer sebagai sistem pemerintahan yang lebih baik dibandingkan sistem totalitarian, otoritarian, monarki absolut, rezim militer, dan kediktatoran. Namun, demokrasi juga mengalami pasang surut, seperti yang terjadi di beberapa negara bekas jajahan yang mengalami pergeseran dari demokrasi ke sistem non-demokrasi setelah kemerdekaan.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos/cratein (pemerintahan), sehingga secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, konsep demokrasi memiliki berbagai perspektif, sebagaimana dinyatakan oleh Robert Dahl dan Harold Laski bahwa tidak ada teori demokrasi yang tunggal, melainkan ada banyak teori demokrasi yang berkembang.

Secara historis, demokrasi pertama kali diterapkan di negara kota Athena sekitar tahun 500 SM. Kleistenes memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih partisipatif dengan membagi warga menjadi beberapa kelompok yang mengirim perwakilan ke Majelis 500. Sistem ini dikenal sebagai demokratia dan bertahan hingga dihancurkan oleh Iskandar Agung pada tahun 322 SM. Demokrasi kemudian mulai berkembang kembali di Eropa pada abad ke-17 melalui pemikiran tokoh-tokoh seperti Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau.

Demokrasi dapat dikategorikan ke dalam tiga makna utama, yaitu sebagai bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai sikap hidup.

### \*1. Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan\*

Plato dan Aristoteles mengelompokkan demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan, selain monarki dan aristokrasi. Plato membedakan antara bentuk pemerintahan yang baik dan buruk. Demokrasi dianggap sebagai pemerintahan yang baik ketika dijalankan untuk kepentingan rakyat, tetapi bisa berubah menjadi mobokrasi atau okhlokrasi jika rakyat tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai pemerintahan.

Aristoteles membagi bentuk pemerintahan ke dalam dua kategori:

1. \*Good Constitution\*: Monarki, Aristokrasi, dan Polity.

2. \*Bad Constitution\*: Tirani, Oligarki, dan Demokrasi.

Menurutnya, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang buruk karena berpotensi menghasilkan ketidaktertiban dan kekacauan.

### \*2. Demokrasi sebagai Sistem Politik\*

Seiring perkembangan waktu, demokrasi tidak hanya dianggap sebagai bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai sistem politik. Machiavelli membagi bentuk pemerintahan menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Jika seorang pemimpin ditunjuk berdasarkan keturunan, maka sistem pemerintahannya adalah monarki. Sebaliknya, jika pemimpin dipilih melalui pemilu, maka sistem pemerintahannya adalah republik.

Henry B. Mayo mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik yang didasarkan pada prinsip mayoritas, dengan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu berkala dalam suasana kebebasan politik. Sementara itu, Samuel Huntington membagi sistem politik menjadi dua: demokrasi dan non-demokrasi. Demokrasi ditandai oleh adanya pemilu yang jujur dan adil, kebebasan bersaing dalam pemilu, serta hak suara bagi seluruh warga negara. Sistem non-demokrasi mencakup sistem totaliter, otoriter, absolut, dan sistem partai tunggal.

### \*3. Demokrasi sebagai Sikap Hidup\*

Selain sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, demokrasi juga dipahami sebagai sikap hidup. Demokrasi tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintahan, tetapi juga harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

John Dewey menekankan bahwa demokrasi adalah pandangan hidup yang mencerminkan pentingnya partisipasi setiap warga negara dalam membentuk nilai-nilai kehidupan bersama. Nurcholish Madjid juga menyatakan bahwa demokrasi merupakan proses yang berisi norma-norma kehidupan bersama. Pandangan serupa diungkapkan oleh Padmo Wahyono, yang menekankan bahwa demokrasi merupakan pola kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Demokrasi sebagai sikap hidup berarti bahwa nilai-nilai demokrasi harus dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup nilai-nilai seperti tanggung jawab, toleransi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Mohammad Hatta menyatakan bahwa demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik jika pemimpin politik memiliki rasa tanggung jawab dan toleransi. Dengan demikian, demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan atau politik, tetapi juga merupakan suatu budaya dan pandangan hidup yang harus ditanamkan dalam masyarakat.

1. \*Demokrasi sebagai Bentuk Pemerintahan\*

Demokrasi awalnya dipahami sebagai salah satu bentuk pemerintahan, seperti yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Plato membagi pemerintahan menjadi monarki, aristokrasi, dan demokrasi, yang semuanya dapat berubah menjadi bentuk buruk seperti tirani, oligarki, dan mobokrasi. Aristoteles, berbeda dari Plato, menganggap demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang buruk dan menyebut bentuk yang baik sebagai polity.

2. \*Demokrasi sebagai Sistem Politik\*

Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi tidak hanya dianggap sebagai bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai sistem politik. Menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik berarti kebijakan publik ditentukan oleh mayoritas melalui perwakilan yang dipilih secara berkala dalam suasana kebebasan politik. Samuel Huntington membagi sistem politik menjadi dua: demokrasi dan non-demokrasi. Demokrasi dicirikan oleh pemilihan umum yang jujur dan adil, kebebasan bersaing bagi calon, serta hak suara bagi seluruh warga negara.

3. \*Demokrasi sebagai Sikap Hidup\*

Demokrasi tidak hanya berjalan di tingkat pemerintahan, tetapi juga menjadi sikap hidup masyarakat. John Dewey menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam menentukan nilai-nilai kehidupan bersama. Demokrasi sebagai pandangan hidup berarti adanya budaya demokratis dalam masyarakat, seperti tanggung jawab, toleransi, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Mohammad Hatta menegaskan bahwa demokrasi hanya bisa berjalan baik jika masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan toleransi.

Dengan demikian, demokrasi tidak hanya sebuah sistem pemerintahan atau politik, tetapi juga sebuah cara hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.